

Aktivisme Arsip dalam Konsep Keberagaman dengan Mengedepankan Perkembangan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Indonesia

I N T I S A R I

Aktivisme kearsipan merupakan konsep mengenai kesadaran arsiparis akan kekuatan sosial arsip sehingga terciptanya keadilan sosial. Penulisan artikel ini menguraikan penerapan konsep aktivisme arsip dalam praktik keberagaman yang secara aktif mendokumentasikan komunitas yang secara tradisional terpinggirkan dari narasi sejarah sehingga kerap kali kurang mendapat kepercayaan karena pengecualian di masa lalu. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran aktivisme arsip yang bersifat keberagaman yang nantinya mengedepan dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan aktivisme arsip serta direlasikan dengan keberterimaan teori appraisal. Teknik analisis data berupa analisis induktif yang bertolak dari data yang ditemukan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat berbentuk kategorisasi maupun proposisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada penutupan dan peminggiran arsip komunitas yang dianalisis seperti keberadaan Pekerja Seks Komersial yang awalnya dianggap komunitas *immoral* bertransformasi sebagai salah satu revolusi kemerdekaan Indonesia; *bissu* yang dianggap komunitas *transvestite* ternyata memiliki kompleksitas dan bermartabat bila dibandingkan status gender di Thailand seperti yang diceritakan dalam epos *I La Galigo*; komunitas Towani Tolotang yang tatkala jauh kondisinya dengan *bissu* telah dipatrikan oleh masyarakat sebagai komunitas yang dipaksa memilih agama untuk keperluan kependudukan, namun dalam resistensinya menggalakan politik formal untuk tidak menggabungkan unsur agama yang ditetapkan undang-undang ke dalam praktik peribadatan mereka. Kemudian, ketiga komunitas ini menunjukkan preventif arsip yang dapat digunakan sebagai ingatan kolektif pendidikan dan ilmu pengetahuan sehingga menempatkan dokumen ini sebagai arsip yang awalnya inaktif berubah menjadi aktif statis. Kesadaran akan implikasi praktis kearsipan sangat penting untuk setiap pemahaman aktivisme arsip. Terdapat enam konsep

PENULIS

Saharul Hariyono
Hilma Nurullina Fitriani

Universitas Negeri Yogyakarta
saharulhariyono@gmail.com
hilmanurullina93@gmail.com

KATA KUNCI

aktivisme arsip,
kearsipan modern,
keberagaman, komunitas

aktivisme arsip yakni, kekuatan sosial, transparansi arsiparis, keberagaman, keterlibatan komunitas, akuntabilitas, dan pemerintahan terbuka. Penelitian ini terbatas pada praktik aktivisme arsip keberagaman. Peneliti memilih konsep keberagaman karena dinilai dapat mengkaji keterbukaan arsip dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia.

A B S T R A C T

Archival activism is a concept about archivists' awareness of the social power of archives to create social justice. The writing of this article describes the application of a concept of archival activism in diversity practices that actively document community that are traditionally marginalized from historical narratives so that they often lack confidence due to exceptions in the past. This article aims to explain the role of archival activism that is diverse which will later come to the fore in the development of education and science in Indonesia. The data were analyzed using archival activism and related to the acceptability of appraisal theory. The data analysis technique is in the form of inductive analysis which starts from the data found to produce conclusions that can be in the form categorization or propositions. The results analysis show that there are closures and marginalizations of community archives analyzed, such as the presence of Prostitute who were initially considered an immoral transformed as one of the revolutions Indonesian independence; bissu, which is considered a transvestite, turns out to be complex and dignified when compared to gender status in Thailand as described in the epic I La Galigo; Towani Tolotang community, whose condition with bissu was long ago identified as a community forced to choose a religion for population purposes, however in its resistance promoted formal politics not to incorporate elements of religion stipulated by law into their worship practices. Three, community showed preventive archives that could be used as a collective memory for education and science, thus placing this document as an archive that was initially inactive but turned into statically active. Awareness of the practical implications of archives is essential to any understanding of archival activism. Specifically, There are six concepts of archival activism: social power,

KEYWORDS

*archival activism,
modern archival, diversity,
marginal community.*

archival transparency, diversity, community engagement, accountability, and open government. This research is limited to the practice of diversity archive activism. Researchers chose the concept of diversity because it is considered to be able to examine the openness of archives in the development of education and science in Indonesia.

PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Disiplin ilmu kearsipan baru memuncak popularitasnya di tahun 1950-an melalui *appraisal theory* (teori arsip modern) yang dicetuskan oleh Theodore Roosevelt Schellenberg berkebangsaan Amerika Serikat (Agniya & Mayesti, 2020: 50; Pratama, 2021: 23). Seiring perkembangannya, keilmuan arsip telah terbiasa berpikir tentang praktik kearsipan sebagai politik dan alat hegemoni (Cook & Schwartz, 2002: 13). Hal ini tampak dari keseriusan Dewan Arsip Internasional (ICA) tahun 1996 yang menyerukan perlindungan, pelestarian, aksesibilitas, transparansi praktik arsip, dan pendidikan profesional, kemudian semakin berkembang dengan munculnya gebrakan dari salah satu lembaga yang cukup populer di Inggris yakni The Black LGBT Archive Project dengan berupaya mendokumentasikan dan memastikan visibilitas Bisexual, Transgender di Inggris Raya hingga akhirnya dipublikasikan dalam serangkaian acara publik dan sebagai intervensi di mana

keberadaan mereka lebih tampak (Vukliš & Gilliland, 2016:1; Flinn 2011: 2).

Menilik posisi disiplin ilmu kearsipan di Indonesia yang kerap kali tampak di mata masyarakat dalam pelaksanaannya hanya dipandang sebagai keterampilan mengelola berkas-berkas serta stagnan bertugas dalam wilayah (institusi) yang bersifat teknis praktis. Beberapa penelitian ditandaskan juga, disiplin ilmu kearsipan nasional bergerak lambat, minimnya sumber referensi, pakar, dan beberapa permasalahan lain bila dibandingkan dengan bidang keilmuan lain yang telah ada.

Pemahaman masyarakat mengenai keilmuan kearsipan juga sering tumpang tindih dengan Ilmu Informasi (Bramantya, 2020: 18). *Library and Information Science* atau Ilmu Informasi merupakan dua bidang yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Adapun yang membedakan dari keduanya tampak pada teori dan metodologi yang digunakan. Ilmu Informasi sangat menaruh perhatian dengan temu kembali informasi, sementara kearsipan mengarah pada

automasi praktikalitas (Priyanto, 2013: 57). Di sisi lain, kearsipan tersebut disejajarkan pula dengan administrasi publik. Padahal dalam praktiknya, arsip sebagai bagian dari proses administrasi hanya ada apabila administrasi itu berjalan. Permasalahan mengenai kearsipan semakin pelik dalam dewasa ini dengan belum terpenuhinya arsiparis profesional baik kualitas maupun kuantitas (Hasanah, 2018: 1).

Kondisi seperti itu sangat berbanding terbalik dengan kearsipan di luar negeri yang telah mapan. Namun, beberapa tahun terakhir kearsipan di Indonesia mulai menunjukkan kinerja yang positif dengan munculnya beberapa artikel ilmiah kritis direntang tahun 2015 sampai sekarang dengan tidak lagi melihat tugas arsip sekadar berperan sebagai pengelola, tetapi sebagai peneliti, edukasi, bahkan sebagai kekuatan sosial. Inti dari setiap sekuel yang telah disebutkan bermakna bahwa arsiparis memiliki agensi dan dipandang memiliki peran ganda dalam praktiknya. Joy Rainbow Novak (2013: 1) dalam disertasinya menyebut dengan istilah *archival activism* (selanjutnya disebut dengan aktivisme arsip). Aktivisme arsip memiliki beberapa poin penting, seperti *social power* (selanjutnya kekuatan sosial) sebagai konsep utama aktivisme, *transparency Archival* (selanjutnya transparansi arsiparis) bahwa arsiparis memberikan

detail informasi secara terbuka, *community engagement* (selanjutnya keterlibatan komunitas) mengacu pada arsiparis mendorong masyarakat ikut terlibat langsung dalam dunia kearsipan, sementara tiga konsep yang tersisa, yakni *diversity* (selanjutnya keberagaman), *accountability* (selanjutnya akuntabilitas) dan *open government* (selanjutnya pemerintahan terbuka) mengarah untuk memperbaiki ketimpangan sosial serta mendukung penuh pemerintahan (Novak, 2013: 1; Astuti & Jumino, 2018: 3).

Rumusan Masalah

Di Indonesia sendiri aktivisme arsip belum terlalu terpublikasi. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sri Puji Astuti & Jumino (2018) dengan memanfaatkan aktivisme arsip untuk mengetahui persepsi arsiparis/pekerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Tampak bahwa hasil penelitian masih menyentuh stimulus keberterimaan untuk mendukung penuh tugas pokok mereka yang menjalankan pengelola informasi. Sementara itu, aktivitas yang sesungguhnya dalam penerapan aktivisme arsip belum terjamah seperti halnya fungsi arsiparis sebagai seorang peneliti untuk mendukung perannya sebagai aktivis yang membongkar dokumen-dokumen bersifat rahasia atau dibatasi dalam khalayak umum. Perihal tersebut tentunya

bersifat sosiopolitis dan ideologis.

Tulisan ini secara eksplisit mengajukan pertanyaan bagaimanakah peran aktivisme arsip yang bersifat keberagaman yang nantinya mengedepankan dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Kajian aktivisme arsip dalam artikel ini diharapkan akan menjadi contoh konkret tentang bagaimana praktik pengarsipan yang dilakukan oleh arsiparis/praktisi sebagai usaha untuk memaksimalkan fungsi arsip sebagai pendukung terciptanya suatu keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran aktivisme arsip yang bersifat keberagaman yang nantinya mengedepankan dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian deskriptif kualitatif yang secara eksplisit menyajikan aktivisme arsip yang bersifat keberagaman untuk menapak komunitas yang secara tradisional terpinggirkan dari narasi sejarah. Dengan kata lain, mendeskripsikan peristiwa sejarah yang terekam dalam arsip dan menjadi sumber rekonstruksi sejarah (Nazir, 2005: 55-64), yang nantinya mengedepankan dalam

pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia serta direlasikan dengan teori appraisal. Penggunaan pendekatan aktivisme arsip yang bersifat deskriptif kualitatif mampu menggambarkan proses situasi dari waktu ke waktu tanpa rekayasa peneliti sehingga memungkinkan pendokumentasian sistematis sebagai landasan untuk pengembangan teori secara induktif. Mengingat, aktivisme arsip merupakan isu yang banyak diperbincangkan akademisi kearsipan internasional saat ini. Data yang diambil berupa komunitas Pekerja Seks Komersial (PSK), *Bissu*, serta Towani Tolotang dengan alasan menunjukkan kesesuaian data aktivisme arsip pada poin keberagaman bahwa komunitas ini kurang mendapat tempat, terpinggirkan, serta mendapat pengecualian di masa lalu. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Keabsahan data dilakukan lewat pembacaan berulang (validitas semantis), rujukan ke buku sumber (validitas referensial), serta diskusi dengan sejawat (*inter-rater reliability*). Teknik analisis data berupa analisis induktif yang bertolak dari data yang ditemukan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat berbentuk kategorisasi maupun proposisi. Langkah-langkah yang dilakukan dengan mengikuti teknik analisis tersebut diharapkan *output*-nya berupa reduksi data yang lebih efisien dengan pola

membuang data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan data yang relevan dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Kerangka Pemikiran

Konsep kearsipan dalam perkembangannya melahirkan dua kubu, yakni kearsipan tradisional dan modernitas. Secara tradisional peran arsiparis terbatas pada proses pengelolaan, perawatan, serta penyediaan akses atas dokumen secara objektif. Kearsipan tradisional berdiri pada paham positivisme dengan secara lantang menolak keberadaan segala kekuatan atau subyek di belakang fakta. Salah satu tokoh yang memegang mahzab tersebut adalah Hillary Jenkinson seorang arsiparis Inggris yang dalam karya-karyanya selalu menunjukkan kesubjektifitasan mengenai arsip (Pease, 1938: 23). Kearsipan mesti mencerminkan seperti apa adanya, selebihnya menjadi segalanya untuk arsip dan tidak boleh ada intervensi, dalam hal ini, yang dimaksud adalah penilaian (Jenkinson, 1937: 124). Metode kearsipan seperti ini banyak mendapat penentangan karena dinilai arsiparis dalam praktiknya bersifat pasif, tugas-tugasnya hanya berkenaan merawat bangunan dan dokumen. Pada tahun 1950-an kearsipan tradisional mendapat tanggapan dari Schellenberg yang mengutamakan penentuan arsip mesti diadakan suatu

penilaian terlebih dahulu (Novak, 2013: 11). Schellenberg tidak keluar koridor untuk mengonseptualisasikan masalah dasar manajemen arsip, melainkan dengan mengaplikasikan sebuah metode yang ada di Amerika dan sampai sekarang menjadi acuan yang digunakan oleh ANRI (Burke, 1981: 41). Penilaian tersebut kemudian dikenal dengan teori appraisal, suatu konsep baru yang diperkenalkan dalam disiplin ilmu kearsipan. Schellenberg (2003: 14) menjelaskan bahwa penilaian tersebut digolongkan ke dalam bentuk, yakni primer dan sekunder yang dapat memberikan kontribusi besar dalam menjembatani antara arsip dan riset. Secara inheren nilai primer berkaitan dengan kegunaannya sebagai bukti bagi instansi, sementara itu, nilai sekunder berkaitan dengan nilai guna di luar kebutuhan instansi yang berkompilasi dengan fungsi sejarah dan budaya (Tschan, 2002: 180). Dengan demikian, arsip dapat digunakan untuk menjalankan otoritas dan kontrol dengan mempertahankan narasi yang mendukung atau memperkuat kekuasaan.

Pemahaman tentang tidak biasanya lagi peran arsiparis, mendorong ke arah yang lebih kritis dengan berkembangnya praktik aktivisme arsip. Konsep ini cenderung mengarahkan arsiparis untuk mengoptimalkan fungsi arsip sebagai alat untuk mendukung terciptanya keadilan sosial (Astuti & Jumino, 2018: 2).

Kesadaran akan implikasi sosial dan praktik kearsipan sangat penting untuk setiap pemahaman aktivisme arsip (Novak, 2013: 24). Upaya untuk mendorong perubahan sosial melalui praktik kearsipan dapat dipahami melalui enam konsep: *Pertama*, Kekuatan Sosial sebagai konsep utama aktivisme. *Kedua*, Transparansi Arsiparis untuk menyatakan keterbukaan tentang perspektif arsiparis dalam pemberian konteks kepada pengguna yang dapat memengaruhi pemahaman tentang arsip (Harris, 2007: 50). *Ketiga*, Keberagaman didefinisikan sebagai aktivitas arsiparis yang secara aktif mendokumentasikan komunitas yang secara tradisional terpinggirkan dari narasi sejarah. Hubungan antara arsip berbasis komunitas dengan bidang kearsipan pada umumnya diperumit oleh hasrat tetap otonom sehingga kerap kali kurang mendapat kepercayaan karena pengecualian di masa lalu (Novak, 2013: 40). *Keempat*, Keterlibatan Komunitas mengacu pada proyek kearsipan yang mendorong partisipasi masyarakat atau akademisi dalam proses kearsipan (Novak, 2013: 38). *Kelima*, Akuntabilitas mengacu tindak pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh arsiparis setelah melakukan tiga poin aktivitas sebelumnya dengan cara pemeliharaan, pendokumentasian (Novak, 2013: 43; Astuti & Jumino, 2018: 4). *Keenam*, Pemerintahan Terbuka mengacu aktivitas

keterbukaan akses arsip pemerintah seperti dokumen-dokumen kenegaraan. Meskipun kadang kala banyak dokumen yang bersifat rahasia, tetapi dalam praktik aktivisme arsip kebutuhan akan akses keterbukaan tetap berlaku (Novak, 2013: 49; Jimerson, 2009: 91).

Dengan penjabaran landasan teori di atas, tulisan ini hanya mendiskusikan poin penting praktik aktivisme Arsip, yakni *Keberagaman* karena dinilai dapat menelaah keterbukaan sebuah arsip dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia serta akan direlasikan dengan keberterimaan teori appraisal.

PEMBAHASAN

Transformasi: Arsip dari Aset Konvensional ke Resistensi

Banyak peristiwa sejarah maupun budaya Indonesia yang telah dideskripsikan arsiparis sebagai ingatan kolektif di dalam dunia kearsipan. Proses pendokumentasian, penyebarluasan, dan pembudayaan telah melintas waktu yang panjang, sejak era kerajaan-kerajaan yang tumbuh silih berganti sampai di era digital saat ini. Bahkan dokumenter tersebut telah menapak sampai ingatan kolektif dunia seperti yang dipaparkan dalam penelitian *Peran Perpustakaan dalam Menyelamatkan Warisan Budaya Bangsa* berupa arsip VOC, naskah kuno Nagarakretagama, naskah kuno *I La*

Galigo, naskah Babad Diponegoro, dan arsip Konferensi Asia Afrika (Rahayu, 2017: 47-48). Beberapa dari arsip tersebut menjadi saksi bisu sejarah panjang kemerdekaan Indonesia.

Dari sekian arsip yang membahas kesaksian sejarah kemerdekaan Indonesia, terdapat fakta sejarah bahwa wanita tuna susila ikut andil dalam mencapai kemerdekaan. Fakta tersebut yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Mereka dipandang sebagai penyakit di tengah-tengah masyarakat serta melakukan tindakan *immoral*. Di dalam surat kabar Merdeka yang terbit 9 Juni 1950 menguraikan selama agresi militer Belanda yang kedua diperkirakan jumlah PSK di Indonesia sekitar 100.000 orang yang tersebar di berbagai daerah, dengan Jakarta sebagai kota terbesar menampung tidak kurang 20.000 orang (Sapto, 2018: 137). Komersialisasi seks di Indonesia berkembang cukup pesat di era kolonial yang banyak bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks bagi orang-orang Eropa. Pada tahun 1852 pemerintahan yang berkuasa melegalkan peraturan industrialisasi seks. Peraturan tersebut lambat laun menjadi bumerang serius bagi pemerintah dikala Indonesia berjuang mengusir para penjajah dengan banyaknya pemuda terkena penyakit kelamin. Padahal, tenaga para pemuda ini sangat dibutuhkan, penderitaan mereka

tatkala bertambah dengan kelangkaan obat-obatan (Cribb, 2009: 35). Kemudian, pemerintah mulai menyasati persoalan ini dengan cara melakukan mobilisasi sumber daya. Di mata Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama, melihat PSK sebagai loyalitas sejati kemerdekaan. Soekarno menyebut PSK sebagai, “rencana brilian yang imajinatif: mengirim pekerja seks ke daerah pendudukan demi melemahkan mental serdadu Belanda dan jadi mata-mata Republik.” Jasa wanita tuna susila terhadap pergerakan revolusi kemerdekaan banyak dibicarakan dalam buku *Sukarno An Autobiography as Told to Cindy Adams* (telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia).



Gambar 1.
Ilustrasi PSK di masa revolusi kemerdekaan
(diambil dari Wikipedia Commons)

“Palacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Aku telah membuktikan di Bandung. Dalam keanggotaan PNI di Bandung terdapat 670 orang perempuan yang berprofesi demikian dan mereka adalah anggota yang paling setia dan patuh. Kalau menghendaki mata-mata yang hebat, berilah aku seorang pelacur yang baik. Mereka sangat baik dalam tugasnya. Yang pertama, aku dapat menyuruh mereka menggoda polisi,” ucap Presiden Soekarno dalam isi buku tersebut (Adams, 2019: 100).

Dari kutipan buku, tampak Presiden Soekarno merekrut para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk ditugaskan sebagai mata-mata dalam mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Adapun sasaran pengerukan informasi difokuskan kepada para polisi kolonial. Tugas mereka sebagai sumber informasi Presiden Soekarno mengenai musuh tidak dapat digantikan oleh pihak manapun kala itu. Tidak mengherankan, seorang kolonel bernama Moestopo memanfaatkan PSK tersebut untuk keperluan gerilya. Jenderal Mayor dr. Mustopo saat itu menyatakan: telah mendirikan organisasi bernama Terate yang anggotanya terdiri dari para PSK dan pelaku tindak kriminal (Rekaman Wawancara: Moestopo. Jakarta: ANRI, No. Inv. 58). Mereka diberi pelatihan sebelum terjun langsung ke kota-kota yang diduduki Belanda. Bahkan pengakuan Brig. Jend. Syarif Tayeb bahwa PSK tersebut diberi komando untuk memotong kemaluan tentara Belanda setelah bersetubuh, yang

dianggapnya tampak berlebihan (Rekaman Wawancara: Syarif Tayeb. Jakarta: ANRI, No. Inv. 79). Perintah seperti ini sangat berisiko bagi PSK maupun berbahaya bagi operasi semacam ini karena dampak yang ditimbulkan bisa saja kebocoran informasi.

Wanita tuna susila ini berperan juga menyumbangkan uang dan tenaga sebagai kepentingan revolusi terkhususnya keuangan partai. Hal ini ditandaskan lagi oleh Presiden Soekarno bahwa “mereka jadi orang revolusioner yang terbaik (Adams, 2019: 110)” Selain itu, dilansir dalam buku *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's and the Indonesian Revolution 1945-1949* peran mereka tampak vital dengan adanya gerakan penyelamatan terhadap Presiden Soekarno dan pejuang lainnya di kala pengintaian oleh tentara Belanda. Para wanita ini mencoba menyembunyikan pemimpin Indonesia pertama di rumah bordil (Cribb, 2009: 33). Hunian mereka juga dipusatkan untuk penyelundupan senjata. Diceritakan terdapat gerakan bernama Laskar Rakyat Jakarta Raya (LRJR) yang memiliki tujuan menyerang Jakarta dalam menaklukkan Jepang dan Belanda. Pada saat itu, kebutuhan akan pasokan senjata sangat penting sehingga rumah PSK dijadikan tempat selundupan. Selain itu, PSK terjun langsung menjadi penyelundup senjata bagi laskar. Kelompok wanita tuna susila ini yang

dianggap komunitas *immoral* ternyata dalam sepeka terjang sejarah, mereka menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia di rentang antara tahun 1945 sampai 1949. Selama periode kepemimpinan Soekarno dari tahun 1945-1967 telah dikumpulkan 573 bundel arsip kertas, 627 bundel arsip foto, dan 151 nomor arsip film yang merekam peristiwa sejarah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertanian, dan keamanan (Putra, 2021: 53), tetapi arsip mengenai peran pekerja seks sebagai salah satu revolusi kemerdekaan Indonesia tidak ditemukan. Aktivisme arsip telah menggambarkan cara repertoar sejarah diaktifkan dan dihidupkan kembali.

Arsip yang diteliti selanjutnya adalah naskah kuno *I La Galigo*. Jika penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menelisik naskah tersebut sebagai tulisan yang telah terdokumenter sebagai ingatan kolektif dunia yang tersimpan di perpustakaan Leiden Belanda dan Museum La Galigo Sulawesi Selatan, akan tetapi, dalam bagian naskah kuno *I La Galigo* tersebut yang dibahas adalah tentang komunitas kecil yang disebut dengan komunitas *bissu* di daerah Sulawesi Selatan. Posisi *bissu* sangat erat kaitannya dengan naskah kuno *I La Galigo* karena sekitar 25 persen naskah tersebut bercerita tentang peranan *bissu* dan memuat pedoman mereka dalam

bertingkah laku. Namun, siapa yang menyangka bahwa tidak ada yang tahu tentang *bissu* di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Graham Davies seorang peneliti Antropolog ketika melakukan penelitian lapangan tahun 1998 di Pangkep banyak yang mengira penelitiannya berfokus pada orang-orang yang bisu ketimbang subyek *bissu* (Davies, 2015: 420; 2018: 314). Banyak juga menganggap komunitas ini hanyalah *transvestites* (transgenderisme) sehingga di kurun waktu 1950-an sampai 1960-an menjadi marginal akibat sasaran pergolakan dari kelompok patriot ke pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada saat itu, kelompok pemberontak yang dipimpin Abdul Qahar Muzakar ini mendoktrin masyarakat agar tidak memercayai *bissu* dengan operasi ekspedisinya yang terkenal, yakni penyebutan *bissu* sebagai bencong/banci. Langkah ini berhasil dan terpatri sampai sekarang.

Pada dasarnya komunitas tersebut bukan *transvestites* melainkan gender kelima seperti yang diceritakan dalam naskah *I La Galigo*. Perihal ini juga dijelaskan oleh salah satu *bissu* dalam menyampaikan kualitas ideal maskulin atau feminim mereka: “*Bissu* sangat sakti karena mereka bukan laki-laki dan tidak perempuan,” (Wawancara dari *bissu* Mariani. 22 Desember 1996. Diizinkan untuk dikutip dari buku *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*).

Adapun tingkatan yang menyamai sejenis *transvestites*, masyarakat Sulawesi Selatan telah menggolongkan dengan penyebutan seperti *calabai*



Gambar 2.
Bissu mengenakan pakaian resmi mereka
(Foto diambil dari Davies)

sebagai laki-laki yang berpenampilan/mendekati perempuan serta *calalai* mengenai perempuan yang berpenampilan layaknya laki-laki (Lathief, 2004: 38; Davies, 2006: 5; 2010: 219-251).

“*Bissu* itu spesial. Kami terlahir sebagai *bissu*, bukan dilahirkan dari bagian-bagian bencong. Kami memiliki derajat tinggi dan lebih suci dari waria seperti *calabai*. *Calabai* biasa kadang menjadi bahan ejekan pemuda, sedang *bissu* disegani karena kesaktian. Perbedaan *bissu* dan *calabai* dengan tidak bolehnya kami pacaran atau kawin” (Wawancara dari *bissu* Haji Yamin. 23 Desember 1996. Diizinkan untuk dikutip dari buku *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*).

Bissu berpenampilan dibalut busana tradisi yang layaknya perempuan disertai dandanan penuh dengan perhiasan yang feminin, tapi mereka juga menyarungkan keris di pinggang dan memakai ikat kepala laki-laki (Chabot, 2018: 244-245; Lathief, 2004: 1). Proses ke-*bissu*-an mereka tidak didapat begitu saja, melainkan dari mimpi yang diturunkan oleh Dewata Sewwae (Tuhan).

Seyogyanya komunitas *bissu* juga dianggap tabu memunyai pacar atau melakukan hubungan seksualitas seperti orang-orang pada umumnya. Mereka takut kena tula, bahkan apabila tertangkap basah melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhi hukuman yang sangat berat (Pelras, 1996: 167). Untuk mengendalikan libido tersebut, para *bissu* mengamalkan ajaran kebatinan *paneddineng parinnyameng* atau khayalan membawa nikmat (Lathief, 2004: 34). Oleh karena itu, perlu ditegaskan lagi dalam pemaknaan komunitas *bissu* berbeda dengan penggambaran laki-laki layaknya berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya yang hanya dipresentasikan sebagai *transvestites*. Kompleksitas yang ada dalam diri mereka sangat bermartabat bahkan lebih jauh bila dibandingkan dengan delapan belas sistem keberadaan gender di Thailand yang diakui secara *de jure*.

Selain tentang masalah komunitas *bissu*, terdapat juga komunitas Towani Tolotang yang berasal dari Pangkajene, Sulawesi Selatan yang mengalami penutupan sejarah atas kejadian yang pernah ada di kurun waktu 1960-an. Pentingnya membicarakan mereka pada subbab ini karena tidak terlepas dari komunitas tersebut tidak banyak mendapat tempat dan posisi penting dalam struktur sosial maupun kenegaraan

Indonesia. Peristiwa yang mereka alami hampir sama dengan apa yang dirasakan *bissu*, mereka dikejar-kejar oleh pasukan negara serta berlanjut ke kelompok Mudzakar lantaran berbeda keyakinan. Negara menghendaki Towani Tolotang memilih salah satu agama dari enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang telah ditetapkan undang-undang, sementara mereka menganut kepercayaan Dewata Sewwae (seperti halnya *bissu*). Pengakuan negara terhadap keberadaan agama yang melingkupi seperti uraian sebelumnya menciptakan persoalan dalam pengelolaannya. Salah satunya melahirkan dikotomi antar agama yang “diakui” dan “tidak diakui.” Kebijakan Negara seperti itu membuat eksistensi agama lokal kental dengan nuansa perpolitikan.

Kebijakan yang merugikan mereka tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tingkat II Sidenreng Rappang, No. Ag. 2/1/7 tahun 1966 berisi pengumuman Tolotang bukanlah suatu agama, kemudian Keputusan Mahkamah Agung RI bahwa Tolotang adalah kepercayaan yang masih terlarang (Alfiansyah et al., 2018: 186; Hasse, 2010: 166). Bahkan kebijakan tersebut telah menyentuh pada tahap intimidasi, yakni negara menjalankan siasat berupa paksaan kepada pimpinan Towani Tolotang untuk menandatangani suatu berkas pencatutan

agama, siasat tersebut diharapkan dapat menarik semua komunitas karena pada dasarnya pemimpin Tolotang (disebut dengan Uwa') memiliki andil besar dengan semua keputusan. Dalam beberapa kasus, digelarnya operasi *malilu sipakainge* oleh pihak militer. Tolotang dibayangi perintah penggabungan kepercayaan dan mencantumkan identitas agama tersebut ke dalam kartu penduduk. Dikatakan “digabungkan” karena bukan semata keinginan mereka melainkan negara dengan kebijakan penyeragaman untuk memudahkan kontrol terhadap agama (Hasse, 2010: 168).

Oleh karena itu, dengan alasan administrasi (kepengurusan nikah, pengakuan dan lain-lain) komunitas ini telah memilih dua agama yang menjadi identitas, yaitu Islam dan Hindu. Namun, dalam praktiknya seperti peribadatan tidak ada satu pun tanda yang meyakinkan untuk mengikuti agama-agama tersebut. Hal ini tidak terlepas dari resistensi politik formal yang mereka galakan rentang tahun 1960-an bahwa agama yang mereka akui hanya sebatas pada formalitas pengakuan terhadap negara (Sapriillah, 2008: 50; Syukur, 2015: 111).

“Komunitas kami harus memilih salah satunya. Pemerintah daerah mengusulkan Islam, Kristen, dan Hindu. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, dipilihlah Hindu. Saat itu, kami resmi beragama Hindu. Namun, adat istiadat komunitas tolotang tetap dipertahankan,” kutipan wawancara Wa' Eja salah satu komunitas tolotang, dikutip di dokumen



Gambar 3. Komunitas Towani Tolotang penganut agama Hindu (Foto diambil dari lokadata.id)

penelitian *Kiprah Towani Tolotang* di perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Narasi-narasi komunitas ini tidak terlalu banyak dibicarakan dalam penelitian ilmiah, tetapi banyak dibicarakan dalam buku karya fiksi *Sawerigading Datang dari Laut; Tiba Sebelum Berangkat* (membicarakan *bissu*) karangan sastrawan lokal Sulawesi Selatan yakni Faisal Oddang (2018; 2019).

Pentingnya menyuarkan, mendokumentasikan dokumen-dokumen komunitas marginal dapat memberikan sebuah pengetahuan baru. Isu keberagaman dianggap penting bagi arsiparis dan dapat memberikan kecakapan dalam penambahan khazanah arsip (Astuti & Jumino, 2018: 7). Pada bagian berikutnya akan dipaparkan dokumen-dokumen yang telah diuraikan dalam subbab ini dapat menjadi bahan pengembangan kolektif pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Preventif Arsip sebagai Peran Ingatan Kolektif Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Arsip memiliki kekuatan untuk mengistimewakan dan meminggirkan. Arsip bisa menjadi alat hegemoni; menjadi alat perlawanan (Cook & Schwartz, 2002: 184). Keduanya mencerminkan dan membentuk hubungan kekuasaan. Mereka adalah produk kebutuhan masyarakat akan informasi, dan kelimpahan sirkulasi dokumen yang mencerminkan pentingnya ditempatkan dalam informasi masyarakat. Seperti diilustrasikan oleh arsiparis Kanada Terry Cook dan Joan Schwartz yang secara inheren menyebut arsip merupakan instrumen kekuatan sosial yang dijalankan melalui kontrol dan penyebaran informasi. Pengertian seperti ini menempatkan sebuah dokumen sebagai arsip statis bernilai sekunder yang sifatnya terbuka yang dapat diakses dan digunakan oleh publik untuk kepentingan akademis. Berkaca pada dokumen-dokumen yang diuraikan pada subbab sebelumnya (yakni: PSK sebagai salah satu revolusi kemerdekaan Indonesia; Komunitas *bissu* bukan *transvetites*; Komunitas Towani Tolotang memilih agama) bahwa informasi yang hadir di tengah masyarakat hanya dianggap biasa saja atau bahkan tidak dikenali. Dokumen-dokumen ini berstatus sebagai arsip primer yang bersifat inaktif atau

Tabel 1. Deskripsi nilai primer inaktif arsip PSK, Komunitas *Bissu*, Towani Tolotang

No.	Arsip	Nilai Primer
1.	PSK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersifat Inaktif: arsip hanya ditemukan pada beberapa platform blog (Kompasiana dan National Geographic Indonesia) serta buku (<i>Sukarno An Autobiography</i> karya Cindy Adams, <i>Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's and the Indonesian Revolution 1945-1949</i> karya Robert Cribb). ▪ Ingatan Kolektif: masyarakat terpatri dengan menganggap PSK hanya penyakit ditengah-tengah masyarakat serta melakukan tindakan <i>immoral</i>.
2.	Komunitas <i>bissu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersifat Inaktif: arsip hanya ditemukan dalam epos <i>I La Galigo</i> (tanpa spesifik menyebut <i>bissu</i>) yang tersimpan di Museum La Galigo Sulsel. ▪ Ingatan Kolektif: masyarakat tidak mengenal komunitas <i>bissu</i>, dianggap komunitas <i>tranvestites</i>.
3.	Komunitas Towani Tolotang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersifat Inaktif: arsip ditemukan pada beberapa artikel ilmiah serta buku fiksi. ▪ Ingatan Kolektif: masyarakat tidak mengenal komunitas Towani Tolotang.

tidak lagi dipergunakan secara terus-menerus; frekuensinya sudah sangat jarang. Bahkan arsip-arsip ini belum terinventarisasi dengan baik oleh lembaga Arsip Nasional yakni ANRI. Dalam urusan kearsipan, Indonesia mempunyai landasan Undang-Undang yang jelas No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, tetapi dalam praktiknya masih banyak persoalan dalam realisasinya (Putra, 2021: 43). Adapun pemodelannya dapat diuraikan pada tabel 1.

Dengan penjabaran tabel 1, tampak pemikiran mengenai ketiga komunitas ini masih tergolong awam. Namun, bila ditelisik menggunakan aktivisme arsip, akan mengarah ke analisis yang lebih menyeluruh, terperinci, dan terbuka. Dengan demikian,

masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih memberikan pemahaman untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih ilmiah. Hal ini berelasi dengan nilai guna sekunder yang bersifat statis. Oleh karena itu, diuraikan pada tabel 2.

Tabel 2 menempatkan dokumen-dokumen yang awalnya inaktif menjadi statis dengan mendokumentasi komunitas yang secara tradisional terpinggirkan dari narasi sejarah. Hal ini juga diungkapkan Taylor (2003: 21) dengan mengganggu arsip sebagai repertoar yang diwujudkan dengan mengkritisi tradisi panjang yang menutup bentuk-bentuk transmisi dokumen (Danbolt, 2010: 104). Dengan pendayagunaan yang tepat serta melalui metode yang ilmiah, arsip-arsip tersebut dapat menjadi sumber ilmu pendidikan dan pengetahuan.

Tabel 2. Deskripsi nilai sekunder statis arsip PSK, Komunitas *Bissu*, Towani Tolotang

No.	Arsip	Nilai Sekunder
1.	PSK	<ul style="list-style-type: none">▪ Bersifat statis: arsip pekerja seks dalam pengetahuan umum dapat bertransformasi sehingga berpotensi bernilai guna ilmiah sebagai sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan.▪ Ingatan Kolektif: mencegah preventif masyarakat dengan tidak lagi menganggap PSK hanya penyakit ditengah-tengah masyarakat serta melakukan tindakan <i>immoral</i>, tetapi sebagai bagian dari revolusi kemerdekaan Indonesia.
2.	Komunitas <i>bissu</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Bersifat statis: arsip tentang <i>bissu</i> tidak hanya lagi diperoleh dari epos <i>I La Galigo</i> yang tersimpan di Museum La Galigo Sulsel tetapi dapat dieksplor lebih dalam baik dari segi lapangan maupun kualitatif.▪ Ingatan Kolektif: masyarakat dapat mengenal komunitas <i>bissu</i>, dan menganggap sebagai komunitas yang bermartabat dan istimewa dari <i>transvestites</i>.
3.	Komunitas Towani Tolotang	<ul style="list-style-type: none">▪ Bersifat statis: arsip Towani Tolotang tidak hanya diperoleh dari penelitian ilmiah tetapi dapat ditemukan dalam karangan fiksi sastrawan Faisal Oddang.▪ Ingatan Kolektif: masyarakat dapat mengenal komunitas Towani Tolotang, mencegah preventif masyarakat dengan tidak menganggap komunitas ini tidak memiliki agama.

SIMPULAN

Analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan praktik aktivisme arsip beragaman dengan sasaran mendokumentasikan komunitas terpinggirkan dari narasi sejarah sehingga dapat ditarik kesimpulan berikut: Pertama, ketiga narasi komunitas seperti PSK yang sebelumnya hanya dianggap komunitas *immoral* ternyata dalam sejarah panjangnya merupakan salah satu revolusi kemerdekaan Indonesia; *bissu* yang dianggap komunitas *transvestites* oleh masyarakat sekitar ternyata mempunyai kompleksitas pada tubuh mereka seperti yang diceritakan oleh naskah *I La Galigo* sehingga membuat keberadaannya lebih terhormat dari

gender yang ada di Thailand; komunitas Towani Tolotang yang tatkala jauh kondisinya dengan *bissu* telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai komunitas yang dipaksa memilih agama untuk keperluan kependudukan. Namun, dalam resistensinya membangkitkan politik formal untuk tidak menggabungkan unsur agama yang ditetapkan undang-undang ke dalam praktik peribadatan mereka. Kedua, Informasi yang hadir di tengah masyarakat mengenai ketiga komunitas yang telah dijabarkan sebelumnya hanya dianggap biasa saja atau bahkan tidak dikenali. Tentu saja menempatkan dokumen ini sebagai arsip primer yang bersifat inaktif atau tidak lagi dipergunakan secara terus-menerus;

frekuensinya sudah sangat jarang, bahkan belum terinventarisasi dengan baik oleh lembaga ANRI sehingga arsip tergolong awam. Namun, setelah dilihat dengan kaca mata aktivisme arsip yang awalnya inaktif menjadi statis dengan pendayagunaannya tepat serta melalui metode pengolahan data yang ilmiah, arsip-arsip tersebut dapat menjadi sumber ilmu pendidikan dan pengetahuan.

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi contoh nyata bagaimana arsiparis/praktisi dalam praktik pengarsipan memaksimalkan fungsi arsip sebagai pendukung terciptanya suatu keadilan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang utuh untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga arsip bersifat sekunder statis. Selain itu, keterbukaan akses kearsipan menjadi kepentingan publik sebagaimana tertera bunyi prinsip *maximum acces and minimum exemption*, sehingga informasi yang terdapat dalam arsip dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peneliti berharap bagi civitas akademika untuk melengkapi penelitian ini dengan mengkaji konsep lain dalam mengoptimalkan fungsi arsip sebagai alat untuk mendukung terciptanya keadilan sosial yang belum disinggung dalam penelitian ini. Hal ini, dilakukan untuk melengkapi keterbatasan penelitian baik

dari hasil analisis maupun pemenuhan sumber penelitian yang relevan. Para akademisi dapat meneliti dengan menggunakan konsep kekuatan sosial, transparansi arsiparis, keterlibatan komunitas, akuntabilitas, atau pemerintahan terbuka. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan andil besar dalam keterbukaan arsip yang awalnya inaktif berubah menjadi statis. Dari berbagai kerumitan keterbukaan arsip, penting untuk mengulas konsep pemikiran Paul Ricœur (seorang filsuf Perancis) tentang *memory, history, forgetting*, yang menandakan suatu bangsa akan merekonstruksi sejarah dengan memilah mana yang akan diingat dan mana yang akan dilupakan. Sejarah yang perlu diingat akan direproduksi sedemikian rupa sehingga menjadi memori kolektif. Sementara itu, sejarah yang ingin dilupakan dibiarkan tersimpan dan tidak disebarluaskan atau malah dihanguskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2019). *Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia* (6th ed.). Yayasan Bung Karno & Media Pressindo.
- Agniya, U., & Mayesti, N. (2020). Penilaian makro arsip: Dasar hukum, metode dan implementasinya. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 4(1).

- Alfiansyah, A., Tang, M., & Muis, S. (2018). Perilaku politik Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 3(2), 184–199.
- Astuti, S. P., & Jumino, J. (2018). Persepsi arsiparis terhadap aktivisme kearsipan (archival activism) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 261–270.
- Bramantya, A. R. (2020). Peran pendidikan kearsipan dalam menghidupkan arsip dan kehidupan sosial. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 16–31.
- Burke, F. G. (1981). The future course of archival theory in the United States. *The American Archivist*, 44(1), 40–46.
- Chabot, H. T. (2018). *Keluargaan, status dan gender di Sulawesi Selatan* (I. S. Wekke (Ed.); 1st ed.). Gawe Buku.
- Cook, T., & Schwartz, J. M. (2002). Archives, records, and power: from (postmodern) theory to (archival) performance. *Archival Science*, 2(3), 171–185.
- Cribb, R. (2009). *Gangsters and revolutionaries: The Jakarta people's and the Indonesian revolution 1945-1949*. Equinox Publishing.
- Danbolt, M. (2010). We're here! We're queer? activist archives and archival activism. *Lambda Nordica*, 15(3–4), 90–118.
- Davies, S. G. (2006). Thinking of gender in a holistic sense: Understandings of gender in Sulawesi, Indonesia. *Advances in Gender Research*, 10(1), 1–24.
- Davies, S. G. (2010). *Gender diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and queer selves*. Taylor & Francis Ltd.
- Davies, S. G. (2015). Performing selves: The trope of authenticity and Robert Wilson's stage production of *I La Galigo*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(3), 417–443.
- Davies, S. G. (2018). *Keberagaman gender di Indonesia* (B. Iksaka (Ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Flinn, A. (2011). Archival activism: Independent and community-led archives, radical public history and the heritage professions. *InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies*, 7(2), 1–20.
- Hafid, H. (2018). *Komunitas Hindu tanpa pura*. Lokadata.Id.
- Harris, V. (2007). *Archives and justice: A South African perspective*. Society of American Archivists.
- Hasanah, S. (2018). Penguatan pendidikan bagi arsiparis. *Jurnal Kearsipan*, 13(1), 1–18.
- Hasse, J. (2010). Kebijakan negara terhadap agama lokal "Towani Tolotang" di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. *Journal of Government and Politics*, 1(1), 158–178.

- Jenkinson, H. (1937). *A manual of archive administration*. P. Lund, Humphries & co.
- Jimerson, R. C. (2009). *Archives power: Memory, accountability, and social justice*. Society of American Archivists.
- Lathief, H. (2004). *Bissu: Pergulatan dan peranannya di masyarakat Bugis*. Desantara Untuk Latar Nusa.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Novak, J. R. (2013). *Examining activism in practice: A qualitative study of archival activism* [Disertasi University of California, Los Angeles].
- Oddang, F. (2019). *Sawerigading Datang Dari Laut*. Diva Press.
- Oddang, Faisal. (2018). *Tiba sebelum berangkat* (1st ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pease, T. C. (1938). *A manual of archive administration*. JSTOR.
- Pelras, C. (1996). *The Bugis* (1st ed.). Blackwell Publishers.
- Pratama, R. (2021). Metadata, arsip, dan informasi: Sumbangan standar-standar kearsipan terhadap kerangka dan model kerjasama keilmuan bidang-bidang serumpun. *Proceeding of International Conference on Documentation and Information, 4*, 15–28.
- Priyanto, I. F. (2013). Apa dan mengapa ilmu informasi? *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, 1*(1), 55–60.
- Putra, P. (2021). Prinsip demokratisasi arsip: Suatu konsep untuk menjembatani antara kearsipan, penulisan sejarah, dan pascamodernisme. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 14*(1), 39–56.
- Rahayu, E. S. R. (2017). Peran perpustakaan dalam menyelamatkan warisan budaya bangsa. *Media Pustakawan, 24*(3), 40–49.
- Rekaman wawancara: Moestopo. Jakarta: ANRI, No. Inv. 58.
- Rekaman wawancara: Syarif Tayeb. Jakarta: ANRI, No. Inv. 79.
- Saprillah. (2008). Melawan arus (strategi komunitas Tolotang mempertahankan kepercayaannya). *Al-Qalam, 14*(1), 39–56.
- Sapto, A. (2018). Keterlibatan bandit, pelacur, dan seniman dalam perjuangan kemerdekaan di Jawa timur (1945-1950). *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya, 12*(2), 128–145.
- Schellenberg, T. R. (2003). *Modern archives: Principles and techniques*. The Society of American Archivists.
- Syukur, N. A. (2015). Kepercayaan Tolotang dalam perspektif masyarakat Bugis Sidrap. *Jurnal Rihlah, III*(1), 109–114.
- Taylor, D. (2003). *The archive and the repertoire: Performing cultural memory in the Americas*. Duke University Press.
- Tschan, R. (2002). A comparison of

Jenkinson and Schellenberg on appraisal. *The American Archivist*, 65(2), 176–195.

Vukliš, V., & Gilliland, A. J. (2016). Archival activism: Emerging forms, local applications. *Archives in the Service of People – People in the Service of Archives*, 2, 14–25.